

PENERAPAN *ELECTRONIC GOVERNMENT*
(Studi Di Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur)

***Wijoko Lestario¹⁾, Puput Ratnasari²⁾**

1) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya,
Indonesia

2) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Palangka Raya, Indonesia

Abstrak

Perkembangan dari ICT terus menerus terjadi sehingga memunculkan kebutuhan dari masyarakat seperti layanan yang berkualitas dari pemerintahan. Sehingga dikeluarkannya Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Problematika dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sering terjadi pada pemerintahan termasuk pemerintah Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur di antaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana seperti fasilitas dan sulitnya akses jaringan internet. Keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus didukung dengan infrastruktur yang baik dan sumber daya manusia yang profesional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana penerapan *Electronic Government (E-Government)* di Desa Waringin Agung. Hasil penelitian penerapan *E-Government* yang sudah dilakukan di Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur adalah penggunaan teknologi seperti komputer dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang. Pelayanan yang berbasis *E-Government* di Desa Waringin Agung belum dapat di manfaatkan dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh keterbatasan jaringan internet yang ada.

Kata Kunci: Penerapan; *Electronic Government*.

PENDAHULUAN

E-Government merupakan program dan komitmen pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik serta melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis untuk menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan (*Knowledgebased Society*). Melalui pengembangan *E-Government*, pemerintah mengharapkan dapat dilakukan

sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Perkembangan dari ICT terus menerus terjadi sehingga memunculkan kebutuhan dari masyarakat seperti layanan yang berkualitas dari pemerintahan. Sehingga dikeluarkannya Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Betapa pentingnya penerapan *E-Government* didalam pemerintahan menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Adapun manfaat *e-government* lainnya yaitu pertama mengurangi biaya, alasannya karena melalui sistem *online*, maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan. Ketiga, meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses (keterbukaan informasi dan partisipasi) pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor instansi pemerintah tertentu. Pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan perlu mendapatkan perhatian serius yang di wujudkan dengan kerja keras oleh semua pihak, seluruh elemen masyarakat diharapkan memberikan informasi yang akurat tentang pemerintahan kelurahan dan potensi-potensi yang dimilikinya untuk dimasukkan ke dalam aplikasi yang akan dibangun.

Problematika dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sering terjadi pada pemerintahan termasuk pemerintah Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur di antaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana seperti fasilitas dan sulitnya akses jaringan internet. Keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus didukung dengan infrastruktur yang baik dan sumber daya manusia yang profesional. Di perlukan dukungan dari pemerintahan pusat dalam hal penyediaan teknologi seperti PC dan sarana internet yang baik. Maka dari itu, diperlukan aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang

memadai serta jaringan internet untuk pengolahan dan pertukaran informasi dari berbagai *stakeholder*.

Seharusnya setiap pegawai mempunyai tugas dan kewajiban sesuai dengan keahlian pada masing-masing pegawai. Mereka mempunyai suatu tanggung jawab sesuai dengan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Namun keterbatasan ilmu dan pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi pada pegawai di Kelurahan Kudangan serta adanya pegawai yang bekerja tidak pada bidang keahliannya masing-masing membuat system menjadi tidak berjalan di Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur. Seharusnya pemerintah Desa harus sudah bisa mengejar kemajuan zaman yang semakin hari semakin berubah-ubah dan berkembang karena kebutuhan pelayanan yang efektif dan efisien sangat diperlukan oleh masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi hendaknya dapat memberikan dampak positif pada sektor pemerintahan maupun bagi masyarakat misalnya seperti dapat menghemat waktu maupun biaya

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut (Von Haldenwang, 2004) *E-Government* merupakan kependekan dari *Electronic Government*. *E-government* adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. *E-government* merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien. World Bank *E-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju *Good Government* (Stephen H et al., 2008).

Dalam prakteknya, *E-Government* adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan

cara yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat (Mulyawan, 2016). Secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dengan *E-Government* adalah untuk menciptakan *customer online* dan bukan *in line*. Selain itu *E-Government* bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana, murah dan efektif. Sehingga tujuan mendasar yang ingin dicapai dari implementasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
- c. Perbaiki organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan.

Dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah dengan menggantikan proses-proses yang "*Paper Based*" (manual, berbasis dokumen/kertas) dengan mengimplementasikan secara utuh konsep "*Government Online*". Yang dimaksud dengan proses manual di sini tidak hanya terbatas pada seluruh aktivitas yang masih menggunakan dokumen atau kertas semata, namun seluruh proses-proses konvensional yang masih menggunakan sumber daya fisik untuk menyelesaikannya, sementara negara lain telah memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikannya (Setiawan, F dan Rhama, 2021). Inti dari transformasi ini adalah tidak semata untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, namun lebih jauh lagi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bernegara. Dengan tersedianya hubungan online 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, maka pemerintah secara tidak langsung telah membuka diri sebagai mitra kerja dari siapa saja yang membutuhkannya, dari berbagai lapisan masyarakat tanpa kecuali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bermaksud membahas fenomena dan mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan penerapan *E-Government* di pemerintah Desa Waringin Agung Kec.

Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2016), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Kountur, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat data (dalam bentuk ringkas), analisis data dan interpretasi terhadap hasil. Sertakan pula apakah hasil dari penelitian dukungan / penolakan terhadap penelitian sebelumnya.

E-Government adalah mekanisme interaksi antara pemerintah dengan masyarakat melalui sistem informasi berbasis internet dan teknologi digital lainnya dengan tujuan memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif. Menurut Indrajit (2002), *E-government* adalah suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan (Fitrianingsih, 2020).

Dalam penerapan *E-Government* terdapat indikator-indikator penting yang harus diperhatikan. Menurut Indrajit indikator indikator tersebut meliputi: a) data infrastruktur; b) infrastruktur legal; c) infrastruktur institusional; d) infrastruktur manusia; e) infrastruktur teknologi; f) strategi pemikiran dan kepemimpinan. (Indrajit, 2004:25). Pertama kesiapan data infrastruktur meliputi manajemen sistem, dokumentasi dan proses kerja ditempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang berfungsi mendukung menuju penerapan *E-Government*. Kedua infrastruktur legal, dasar hukum dan peraturan-peraturan merupakan landasan dalam penerapan *E-Government*. Ketiga infrastruktur institusional, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dalam membangun *E-Government*. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan baik antar lembaga tentang penerapan

E-Government. Keempat infrastruktur manusia, penerapan *E-Government* dalam pelaksanaannya membutuhkan kemampuan sumber daya aparatur, karena penerapan *E-Government* harus didukung dengan aparatur yang berkompeten dibidang teknologi informasi. Kelima infrastruktur teknologi, inisiatif penerapan *E-Government* banyak bertumpu pada infrastruktur teknologi maka implementasi penerapan *E-Government* harus disesuaikan dengan kondisi infrastruktur yang tersedia. Dengan adanya infrastruktur teknologi yang memadai maka penerapan *E-Government* akan berjalan sebagaimana mestinya. Keenam strategi pemikiran dan kepemimpinan, penerapan *E-Government* di dalam pelaksanaannya membutuhkan pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang berkaitan dengan *E-Government*. Hal tersebut diperlukan agar agenda strategi serta pemikirannya yang berkaitan dengan *E-Government* akan diwujudkan secara nyata.

Dari indikator-indikator *E-Government* menurut Indrajit (2004), penerapan *E-Government* di Kelurahan Kudangan merupakan bentuk dari perwujudan dari Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu berkaitan dengan indikator infrastruktur legal. Adapun penerapan *E-Government* yang sudah dilakukan di Kelurahan Kudangan adalah penggunaan teknologi seperti komputer dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Kudangan. Seperti yang diketahui bahwa seluruh tata pemerintahan baik dari tingkat terendah hingga tingkat teratas diharuskan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien dengan menerapkan sistem pelayanan yang berbasis teknologi atau disebut dengan *Electronic Government* (Maulidiah, 2014).

Dari hasil penelitian di Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis *E-Government*. Aplikasi tersebut antara lain ada aplikasi presensi, dan juga aplikasi prodeskel. Yang dimana dengan aplikasi-aplikasi tersebut memudahkan perangkat Desa untuk menjalankan proses tata kerja di Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur.

a. Aplikasi Presensi.

Aplikasi presensi bertujuan untuk menjaga ketertiban pegawai sehingga pegawai yang bekerja tidak semena-mena datang dan pergi di hari kerja. Proses pelaksanaan presensi pegawai di desa dilakukan sebanyak dua kali dalam satu hari. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui karyawan yang tidak masuk kerja pada hari itu dan untuk mencegah karyawan yang berkerja setengah hari tanpa alasan yang tepat, seperti datang terlambat dan meninggalkan tempat kerja lebih awal. Relasi dari *E-Government* pada aplikasi ini masuk dalam jenis *Government to employees* yaitu merupakan sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainnya. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah. Aplikasi presensi ini servernya berasal dari Kominfo.

Proses penerapan :

- Sosialisasi : Awal tahun 2020 dilakukannya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lamandau dalam rangka menindaklanjuti kedisiplinan pegawai. Sosialisasi dilakukan di Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur, dan diikuti oleh Kades Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur, narasumber pada sosialisasi menyampaikan aplikasi ini bertujuan untuk lebih mendisiplinkan pegawai serta memudahkan dilakukan pemantauan oleh pimpinan terhadap kedisiplinan pegawai.
- Pelatihan : Untuk dapat menggunakan aplikasi presensi pihak kelurahan mengikuti pelatihan bagaimana menerapkan aplikais presensi di desa, pelatihan ini dilakukan oleh pemerintah Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur dan diikuti oleh seluruh pegawai desa.
- Implementasi : Tahap pertama yaitu melakukan installasi aplikasi Attendance Management. Instalasi dilakukan pada komputer di lokasi mitra, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengolah data kehadiran berbasis fingerprint, kedua dilakukannya input data setiap aparat kelurahan ke dalam sistem. Data yang diinputkan diantaranya: nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jabatan, alamat. Ketiga pengaturan jam kerja dan jadwal kerja pada aplikasi attendance management, tahap ini dilakukan pengaturan jam kerja dan jadwal kerja sesuai

aturan berlaku di kantor lurah. Keempat transfer data identitas aparat desa dari aplikasi attendance management ke mesin fingerprint. Data aparat desa yang telah tersimpan di database pada aplikasi attendance management, selanjutnya ditransfer ke mesin fingerprint. Terakhir dilakukan pengambilan pola sidik jari setiap aparat desa, agar setiap aparat dapat menggunakan sistem presensi berbasis fingerprint. Pengambilan pola sidik jari disesuaikan dengan identitas setiap aparat yang telah tersimpan pada mesin fingerprint.

- Evaluasi : Lebih banyak yang mendukung hal itu dilaksanakan, karna lebih dapat meningkatkan kedisiplin pegawai.

b. Aplikasi SIKS-ING (Sistem Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*).

Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur sudah menggunakan aplikasi ini, aplikasi ini adalah sebuah aplikasi untuk menginput data-data masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat bantuan dari dinas sosial. Relasi dari *e-government* pada aplikasi ini masuk dalam tipe *government to government* yaitu sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Untuk aplikasi ini masuk dalam server Kementerian Sosial.

Proses Penerapan :

- Sosialisasi : Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur mendapat sosialisasi dari pemerintah Kabupaten tentang aplikasi SIKS-ING, yang dimana dengan aplikasi ini pemerintah Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur dapat menginput data-data penerima bansos dari dinas sosial.
- Pelatihan : Pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten diikuti aparatur pemerintahan termasuk Kades Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur
- Implementasi : Implementasi aplikasi di Kelurahan Kudangan adalah dengan membuka aplikasi SIKS-ING, lalu memasukan data-data masyarakat Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur penerima bantuan dari dinas sosial.

- Evaluasi : banyak masyarakat yang merasa terbantu, pihak desa juga merasa dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan pekerjaan dalam mendata masyarakat penerima bantuan.

c. Aplikasi Prodeskel.

Aplikasi ini merupakan alat pemantau potensi dan tingkat perkembangan daerah Desa atau Kelurahan. Dan menjadi media komunikasi antara pusat dan daerah. Prodeskel menjadi alat pemantau potensi dan tingkat perkembangan, sebagai laboratorium pusat kajian akademis masalah-masalah sosial dan ekonomi desa dan kelurahan serta sumber data bagi kementerian dan lembaga yang ingin merencanakan program-program pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang yang berbasis pada data desa dan kelurahan. Relasi dari *e-government* pada aplikasi ini masuk dalam tipe *government to government* yaitu sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Untuk aplikasi ini masuk dalam server Kemendagri.

Proses penerapan :

- Sosialisasi : Sosialisasi dilaksanakan di Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur, dalam sosialisasi menjelaskan penggunaan aplikasi profil desa dan kelurahan (Prodeskel) memiliki manfaat yang sangat berdampak dalam jangka panjang karena aplikasi tersebut berfungsi sebagai gudang desa dan kelurahan seluruh Indonesia yang melibatkan pengguna secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan hingga ke tingkat pusat.
- Pelatihan : Pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten lamandau diikuti aparatur pemerintahan termasuk Kades
- Implementasi : untuk implementasi aplikasi prodeskel adalah dengan masuk ke web Prodeskel Bina Pemdes, lalu memasukan data-data potensi yang ada di Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur
- Evaluasi : dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan proses komunikasi pemerintah Pusat dengan kelurahan Kudangan dalam menentukan program kerja apa yang akan dilakukan dengan melihat potensi Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur yang data-datanya telah tersedia di dalam aplikasi Prodeskel.

Untuk dapat meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien diperlukannya kebijakan dan strategi pengembangan *E-Government* agar kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat berkembang dengan pesat serta dapat membuka peluang dalam pengaksesan dan juga pengelolaan dari teknologi itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dengan Kades Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur, dalam pelaksanaan penerapan *E-Government* hanya sebagian dari perangkat kelurahan yang bisa dan memahami dalam menggunakan perangkat komputer. Dalam kegiatan tata usaha kantor Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur semua tercatat sebagai bahan keterangan bagi Kades, yang dimana kegiatan tata usaha adalah menghimpun, mengolah, mengirim mencatat dan menyimpan data. Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur dari pelaksanaannya bahwa kegiatan tata usaha administrasi hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja yang bisa menguasai dalam bidang komputer. Hal ini dikarenakan banyak yang tidak bisa mengoperasikan komputer dan tidak bisa mengolah data administrasi kelurahan dengan aplikasi komputer.

Dengan adanya pemanfaatan teknologi dilingkungan Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur maka hal ini dapat menunjang dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur. Karena dengan adanya teknologi maka bisa digunakan sebagai alat untuk mencari segala informasi dari berbagai sumber. Dengan komputer maka akan memudahkan pekerjaan perangkat desa dalam menyelesaikan tata usaha seperti menyelesaikan laporan dan juga membuat laporan keuangan dengan menggunakan *Microsoft Excel*, pemrosesan surat keluar dan surat masuk. Untuk meningkatkan sumber daya aparatur dalam bidang teknologi, pemerintah Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur juga melakukan pelatihan kepada perangkat kelurahan, yang dimana tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan perangkat kelurahan dalam bidang teknologi. Dengan demikian semulannya yang tidak mengetahui sama sekali dalam memanfaatkan teknologi menjadi lebih tahu apa itu teknologi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses penerapan *E-Government* di Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur sudah mulai menerapkan system pemerintah berbasis teknologi seperti memanfaatkan teknologi berupa komputer dalam segi pelayanan kepada masyarakat dan juga memanfaatkan komputer dalam proses tata pemerintahan di kantor Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur. Pemerintah Desa Waringin Agung Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur juga sudah menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis *E-Government* seperti aplikasi presensi, dan prodeskel untuk menginput data masyarakat penerima bantuan dari Dinas Sosial yang dimana dalam menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut harus mendatangi jaringan *WiFi* terlebih dahulu atau pergi ke tempat yang tersedia jaringan internet.

REFERENSI

- Fitrianingsih, N. (2020). *Efektivitas Pajak Restoran Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*.
- Kountur, R. (2007). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*.
- Maulidiah. (2014). *Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan*. CV. Indra Prahasta.
- Mulyawan, R. (2016). *Birokrasi dan Pelayana Publik*.
- Setiawan, F dan Rhama, B. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Mediansosian*, 7(1), 14–28.
- Stephen H, H., Norris, D. F., & Fletcher, P. D. (2008). Electronic government at the local level: Progress to date and future issues. *Public Performance & Management Review*, 26(4), 325–344.
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Von Haldenwang. (2004). Electronic government (e-government) and development. *The European Journal of Development Research*, 16(417–432).